

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi publik di Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia guna menunjukkan hasil kinerja yang baik pada organisasi publik tersebut. Salah satu bukti nyata organisasi publik telah memberikan layanan terbaik adalah dengan menunjukkan hasil kinerja secara transparan melalui laporan keuangannya. Tuntutan masyarakat dimasa dewasa ini adalah dihasilkannya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sebagai alat bukti transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkembang dengan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat.

Menurut (Ridzal et al., 2022) Laporan keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel kepada publik. Namun, dalam menyusun laporan keuangan perlu dipastikan agar laporan keuangan yang disusun memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk mengukur kualitas laporan keuangan diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh dan berkala. Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa laporan keuangan pada setiap periode pelaporan dan memberikan opini mengenai gambaran kualitas atau kewajaran laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menggambarkan tingkat kewajaran terhadap penyajian laporan keuangan terutama kesesuaian terhadap standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Standar akuntansi yang digunakan bisa dikatakan sebagai standar yang menjaga kualitas laporan keuangan agar informasi yang disajikan tidak terdapat bias pada saat pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Pada faktanya masih ditemukan beberapa kesalahan pada laporan keuangan pemerintah, contohnya pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember didapati beberapa kesalahan terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (Setyono, 2022), BPK Perwakilan Jawa Timur berhasil menemukan tiga kesalahan yang ditemukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Pertama, BPK menemukan adanya salah penyajian dalam pencatatan aset tetap dengan saldo buku sebesar Rp4.024,80 miliar yang belum ditentukan nilai perolehannya sehingga berdampak pada kewajaran nilai perolehan dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan. Kedua terdapat duplikasi data pada penerima bantuan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp47,18 miliar. Ketiga, terdapat kesalahan pada Bendahara

Pengeluaran, pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran dana BTT Covid-19 TA 2020 yang belum disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga belum dapat diakui sebagai realisasi belanja yang sah.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disinyalir bahwa penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember masih belum optimal. Hasil studi empiris sebelumnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Namun, hasil studi empiris sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ridzal et al., 2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Yaqin & Jatmiko, 2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (Irafah et al., 2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan keahlian pada seseorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerjanya (Irafah et al., 2020). Kompetensi sumber

daya manusia menjadi hal yang memiliki pengaruh dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas selain dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia, faktor lain yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas adalah pemanfaatan teknologi informasi pada instansi, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka akan mendukung kelancaran kegiatan operasi instansi tersebut. Adanya teknologi informasi ini mampu membantu efektivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemerintah juga memiliki peraturan yang menyatakan untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu (Yaqin & Jatmiko, 2018). Selain pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia, pengendalian Internal juga berperan dalam pengaruh tingkat kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal adalah sebuah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan

mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Menurut (Ningrum, 2018) tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian Internal dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena-fenomena yang peneliti temukan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jember dikarenakan Kabupaten Jember memiliki potensi untuk menjadi kontributor terbesar dalam bidang pertanian dibandingkan dengan kota lain (Diskominfo Jember, 2022). Hal tersebut memotivasi penulis sehingga ingin melakukan penelitian dengan judul **"Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember
2. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berikut adalah manfaat teoritis dalam penelitian, diantaranya :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat diaplikasikan melalui teori dan praktik.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama, selain itu dapat menambah pengetahuan penulis mengenai topik dalam penelitian ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember, dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

